Perspektif Akuntansi
Volume 6 Nomor 3 (Oktober 2023), hal. 39-57
ISSN: 2623-0194 (Print), 2623-0186 (Online)
Copyright© The Authors(s). All Rights Reserved
Center for Accounting Development and Research (CARD)
Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Kristen Satya Wacana
DOI: https://doi.org/10.24246/persi.v6i3.p39-57
http://ejournal.uksw.edu/persi

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Efisiensi Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara

Linda Arisanty Razak
Universitas Muhammadiyah Makassar
Wa Ode Rayyani
Universitas Muhammadiyah Makassar
Salwa Khaerunniza[1]
Universitas Muhammadiyah Makassar

Received *31/05/2023*
Revised *10/08/2023*
Accepted *25/09/2023*

Abstract. *This study aims to examine the effect of Good Corporate Governance as measured by the board of directors, independent board of commissioners and public ownership on the management efficiency of State-Owned Enterprises. The type of research used is a type of quantitative research. This study uses secondary data obtained from the annual financial reports of state-owned enterprises. The population in this study is State-Owned Enterprises from 2017-2022. The method used in sampling is purposive sampling method so that a sample of 11 companies is obtained. The analysis technique used in this research is panel data regression analysis with the selected regression model, namely the Random Effect Model (REM) using the Eviews 12 program. The results of this study indicate that the independent board of directors and board of commissioners variables have no effect on the management efficiency of State-Owned Enterprises. Meanwhile, the public ownership variable has a positive effect on the management efficiency of State-Owned Enterprises.*

Keywords: *board of directors, independent board of commissioners, good corporate governance, public ownership*

[1] *khaerunnizasalwa2001@gmail.com*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* yang diukur dengan dewan direksi, dewan komisaris independen dan kepemilikan publik terhadap efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan Badan Usaha Milik Negara. Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Negara dari tahun 2017-2022. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 11 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan model regresi yang terpilih yaitu *Random Effect Model* (REM) menggunakan alat bantuan program *Eviews* 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dewan direksi dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap efisiensi pengelolaan Badan usaha Milik Negara. Sedangkan variabel kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap efisiensi pengelolaan Badan usaha Milik Negara.

Kata Kunci: dewan direksi, dewan komisaris independen, *good corporate governance,* kepemilikan publik

Pendahuluan

Salah satu tujuan penting pendirian perusahaan BUMN adalah untuk meningkatkan perekonomian negara dengan kinerja keuangan yang maksimal. Kinerja keuangan perusahaan sangat tergantung pada bagaimana manajemen mengelola perusahaan dengan efisien dalam melaksanakan aktivitas perusahaan tersebut. Dengan efisiensi yang baik, dapat menekan biaya yang terkait produksi maupun distribusi produk dan jasa serta harga produk menjadi lebih bersaing (Amrullah & Eriandani, 2013).

Fenomena yang terjadi saat ini yaitu maraknya efisiensi BUMN yang dilakukan oleh kementerian BUMN, dikutip dari *bumn.go.id* dalam siaran pers No.PR-41/S.MBU.33/6/2020 tentang efisiensi BUMN dimana Erick Thohir selaku menteri BUMN terus melakukan efisiensi di tubuh BUMN, salah satunya yaitu dengan melakukan penyederhanaan jumlah BUMN. Tercatat jika sebelumnya jumlah BUMN mencapai 142 perusahaan, kini menjadi 107 perusahaan. Kebijakan pengurangan jumlah BUMN ini dilakukan karena banyaknya perusahaan BUMN yang tidak efisien dalam melaksanakan aktivitas usahanya, sehingga dengan banyaknya perusahaan BUMN yang disatukan diharapkan mampu meningkatkan kemandirian perusahaan dan meningkatkan efisiensi sehingga mampu mendapatkan profitabilitas yang maksimal. Karena pentingnya efisiensi bagi perusahaan maka menteri BUMN berkomitmen untuk terus memangkas jumlah perusahaan BUMN hingga mencapai angka 80 perusahaan, dan beliau juga berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi dan restrukturisasi perusahaan BUMN.

Pentingnya efisiensi dalam suatu perusahaan tidak hanya menjadi perhatian pihak manajemen, tetapi juga menjadi pertimbangan penting bagi pemilik perusahaan dalam hal ini pemegang saham. Untuk mewujudkan efisiensi pengelolaan perusahaan

diperlukan adanya penerapan *Good Corporate Governance. Good Corporate Governance* memberikan insentif yang tepat untuk dewan direksi, manajemen dan pemegang saham dan juga memfasilitasi pengawasan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya secara efisien (Orgnanization for Economic Cooperation and Development, 1999) dalam (Amrullah & Eriandani, 2013).

Perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak asing lagi dengan konsep *good corporate governance,* akan tetapi pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang melanggar prinsip-prinsip *good corporate governance* (Laurent, 2019). Fenomena praktis yang terjadi pada salah satu perusahaan BUMN di Indonesia yang melakukan praktik pelanggaran *good corporate governance* adalah kisruh laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dikutip dari kemenkeu.go.id Kondisi keuangan Garuda Indonesia dalam kondisi yang tidak baik. Semester I 2021 perusahaan mencatat kerugian bersih mencapai Rp 12,85 triliun. Masalah utama gugatan-gugatan terhadap Garuda adalah disebabkan karena utangnya yang makin membengkak sampai dengan Rp 70 triliun. Sebagian besar utang tersebut merupakan utang yang berasal dari beban sewa pesawat *(leasing)* yang salah saji dalam laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Utang sewa pesawat tersebut sebagian besar disebabkan kesalahan manajemen yang dilakukan selama bertahun-tahun (Kurniawan, 2021).

Mekanisme *Good Corporate Governance* dalam penelitian ini adalah dewan direksi, dewan komisaris independen dan kepemilikan publik. Dewan direksi bertugas untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan penuh tanggung jawab dan tetap memperhatikan kepentingan para pemegang saham. Selain itu, keberadaan dewan komisaris independen sangat penting untuk menjalankan fungsi monitoring dalam mengevaluasi kebijakan dan keputusan direksi. Kepemilikan publik merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh masyarakat (pihak luar perusahaan). Penyertaan saham oleh masyarakat akan meningkatkan efisiensi perusahaan, karena pihak manajemen akan semakin termotivasi melakukan praktek *good corporate governance* yang lebih baik sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap publik (Jensen & Meckling, 1976) dalam (Masitoh & Hidayah, 2018). *Agency theory* merupakan dasar yang digunakan untuk menjelaskan tentang *good corporate governance.* Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Jansen dan Meckling pada tahun 1976 yang mengasumsikan mengenai hubungan keagenan, dimana hubungan keagenan ini timbul karena adanya kesepakatan antara prinsipal dan agen yang merupakan pengelola perusahaan.

Penelitian terkait *good corporate governance* dan efisiensi pengelolaan perusahaan meski sudah banyak dilakukan, akan tetapi riset pada Badan Usaha Milik Negara khususnya di Indonesia tergolong masih terbatas. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Eksandy, 2018) menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap efisiensi perusahaan, komisaris independen, dewan pengawas syariah dan komite audit tidak berpengaruh terhadap efisiensi perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Khanida & W, 2022) menunjukkan bahwa dewan komisaris

independen, komite audit, kepemilikan publik dan kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap efisiensi perusahaan, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap efisiensi Perusahaan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Fajri *et al.,* 2022) menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap efisiensi Perusahaan, dan dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap efisiensi perusahaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pengambilan sampel dengan periode penelitian yang berbeda dan pengukuran variabel serta teknik analisis yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan tiga indikator *good corporate governance* untuk menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara dengan memfokuskan kepada kepemilikan publik.

Berdasarkan fenomena dan research gap diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Efisiensi Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara".

Telaah Pustaka (Kerangka Teori)

Teori Keagenan (Agency Theory)

Grand theory dalam penelitian ini menggunakan teori keagenan *(agency theory)* dimana teori ini merupakan dasar yang digunakan untuk menjelaskan tentang *good corporate governance.* Teori ini pertama kali diungkapkan oleh Jansen dan Meckling pada tahun 1976. Sifat dasar manusia terkait dengan teori keagenan yaitu manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri *(self-interest),* manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi dimasa yang akan datang *(bounded-rationality),* dan manusia selalu menghindari risiko *(risk-averse).*

Jansen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan dimana pihak *principal* mempekerjakan *agent* untuk mengelola perusahaan. Kesepatakatan antara *principal* dan *agent* menjadi dasar dalam melakukan kerjasama. *Principal* memberikan kewenangan kepada *agent* untuk mengambil keputusan dan *agent* wajib memberikan laporan kepada *principal* sebagai bentuk akuntabilitas (Hidayat *et al.*, 2021).

Efisiensi Pengelolaan Perusahaan

Efisiensi merupakan salah satu dimensi dari kinerja (Bartol & Martin, 1991). Dimensi efisiensi ini semakin urgen dan menjadi sorotan para pelaku bisnis di berbagai negara karena efisiensi dapat meningkatkan daya saing perusahaan, dan daya saing penting bagi organisasi atau perusahaan untuk tetap *survive* (Amrullah & Eriandani, 2013). Efisiensi merupakan sebuah indikator keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi yang diukur dari banyaknya sumber daya yang digunakan dalam menjalankan suatu kegiatan (Muhammad, 2015:262). Efisiensi juga menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai suatu

hasil. Dengan demikian, efisiensi dapat dikatakan sebagai komponen produktivitas yang mengacu pada perbandingan jumlah aktual dari jumlah optimal input dan output (Ghofur & Sukmaningrum, 2018).

Efisiensi pengelolaan perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio *total asset turnover* (TATO). Menurut (Hanafi & Halim, 2009) menyatakan bahwa *rasio total asset turnover* adalah rasio aktivitas (rasio efisiensi) yang mengukur sejauh mana kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan penjualan berdasarkan total aset yang dimiliki dari perusahaan tersebut. Rasio perputaran total aset memiliki dua indikator, yaitu penjualan dan total aset.

Good Corporate Governance (GCG)

Menurut (Franita, 2018) *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan proses pengelolaan usaha yang berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai saham, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* yaitu kreditur, karyawan dan masyarakat.

Menurut FCGI (2001) pengertian *Good Corporate Governance* adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen (pengelola) perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (Sarafina & Muhammad, 2017).

Dewan Direksi

Menurut undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Panjaitan *et al.,* 2022). Dewan direksi mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Dengan adanya pemisahan peran dengan dewan komisaris, dewan direksi memiliki kekuasaan yang besar dalam mengelola sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi mempunyai tugas untuk memastikan kebijakan-kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan kepengurusan, keuangan, kepemilikan saham, dan hubungan keluarga dengan anggota direksi, dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali atau hubungan dengan persusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

Komisaris independen adalah organ yang memiliki fungsi pengawasan atas pengelolaan manajer. Penerapan *good corporate governance* membutuhkan dewan komisaris independen untuk bertindak sebagai jembatan antara pemegang saham dan manajer. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen dilakukan dengan memberikan arahan dan pengawasan terhadap pengelolaan manajer serta memastikan bahwa pengelolaan yang dilakukan sejalan dengan strategi perusahaan (Hidayat *et al.*, 2021).

Kepemilikan Publik

Kepemilikan Publik merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh masyarakat (pihak di luar perusahaan). Kepemilikan saham publik merupakan sumber pendanaan eksternal bagi perusahaan. Kepemilikan saham oleh pihak luar dapat mengurangi biaya keagenan dengan meningkatkan pengawasan terhadap perilaku manajer (Jensen & Meckling, 1976).

Perusahaan yang *go public* dituntut untuk lebih transparan dalam mengungkap informasi yang tepat dan relevan dengan tujuan menciptakan pasar modal yang efisien. Dengan proporsi saham yang dimiliki publik lebih besar, maka pengawasan dan tanggung jawab perusahaan akan menjadi lebih besar. Investor dari pihak diluar manajemen atau investor publik membutuhkan perlindungan atas investasi yang mereka tanam, perlindungan ini dapat berupa informasi non keuangan dan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan melalui laporan tahunan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan (Saputra & Mahyuni, 2018).

Pengembangan hipotesis (Kerangka konseptual)

Teori keagenan adalah hubungan antara prinsipal dan agen dimana prinsipal memberikan kekuasaan atau mendelegasikan wewenang kepada agen dan agen memiliki tanggungjawab penuh untuk memaksimalkan keuntungan pemilik perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Dewan direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki posisi penting dan kedudukan yang strategis dalam perusahaan. Dewan direksi dengan ukuran lebih besar, yaitu dengan jumlah anggota yang lebih banyak akan menghasilkan kualitas keputusan terbaik karena adanya koordinasi antar anggota direksi sehingga akan berpengaruh pada meningkatnya efisiensi perusahaan. Semakin besar jumlah anggota dewan direksi pada perusahaan maka pengelolaan perusahaan akan semakin baik, yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi perusahaan dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas perusahaan. Perusahaan dengan ukuran dewan direksi yang besar cenderung memiliki pengawasan yang efektif yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Fajri *et al.,* 2022). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Subhan & Usman, 2022) menyatakan bahwa *good corporate governance* yang diukur dengan dewan direksi berpengaruh positif terhadap efisiensi perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H_1: Dewan direksi berpengaruh positif terhadap efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara

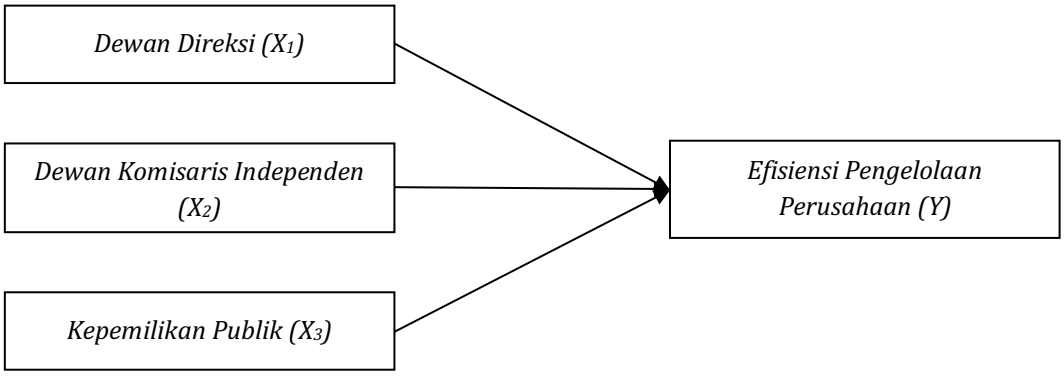
Dalam teori agensi, terdapat asimetri informasi antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976). Dewan komisaris independen berperan sebagai penengah antara para manajer internal dan mengawasi kebijakan direksi serta bertugas sebagai pemberi nasihat kepada direksi untuk mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Dengan perannya tersebut, dewan komisaris independen diharapkan mampu bertindak independen dan objektif untuk melindungi kepentingan para pemegang saham agar mendapatkan kesetaraan. Persentase dewan komisaris independen yang tinggi pada suatu perusahaan dapat membatasi terjadinya kecurangan, dan menahan manajer menyimpang atau pengambilalihan sumber daya perusahaan. Jika proporsi dewan komisaris independen bertambah maka pengawasan yang dilakukan juga akan semakin ketat (Fajri *et al.,* 2022). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Khanida & W, 2022) menyatakan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap efisiensi perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H_2: Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara

(Jensen & Meckling, 1976) menyatakan bahwa publik mempunyai peran penting dalam menciptakan *well-functioning government system* karena mereka memiliki *financial interest* dan bertindak independen dalam menilai manajemen. Kepemilikan Publik adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh masyarakat (pihak luar perusahaan). Kepemilikan saham masyarakat merupakan sumber pendanaan eksternal bagi perusahaan. Kepemilikan saham oleh pihak luar juga dapat mengurangi biaya keagenan dengan meningkatnya pengawasan terhadap perilaku manager (Jensen & Meckling, 1976). Sehingga, pihak manajemen akan semakin termotivasi untuk melakukan praktik *good corporate governance* yang lebih baik sebagai bentuk akuntabilitas manajemen kepada publik. Semakin besar kepemilikan publik maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan karena keterbukaan laporan keuangan perusahaan menyebabkan manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk menjamin investor bahwa dana yang ditanamkan pada perusahaan digunakan secara efisien untuk menghasilkan keuntungan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Khanida & W, 2022) menyatakan bahwa kepemilikan publik mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap efisiensi perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H_3: Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Metoda

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder, artinya sumber data penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti secara tidak langsung melainkan dengan pihak lain. Sumber data dalam penelitian ini yaitu berupa laporan keuangan tahunan perusahaan BUMN dari tahun 2017-2022 yang dapat diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dan situs resmi masing-masing perusahaan.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Negara dari tahun 2017-2022. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode *purposive sampling.* Berikut ini adalah proses dalam pengambilan sampel penelitian:

Tabel 1. Hasil Purposive Sampling

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan BUMN di Indonesia selama tahun 2017-2022	45
2.	Perusahaan BUMN yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan selama 6 tahun berturut-turut, tahun 2017-2022	(16)
3.	Perusahaan BUMN yang menerbitkan laporan keuangan tahunan selain dalam mata uang rupiah	(3)
4.	Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan informasi mengenai *good corporate governance* (dewan direksi, dewan komisaris independen dan kepemilikan publik) maupun data yang diperlukan untuk menghitung efisiensi pengelolaan perusahaan *(total asset turnover)*	(15)
	Jumlah sampel yang memenuhi kriteria	11
	Jumlah data observasi tahun 2017-2022 (11 x 6)	66

dengan kriteria: (1) Perusahaan BUMN selama tahun 2017-2022 (2) Perusahaan BUMN yang menerbitkan laporan keuangan tahunan selama 6 tahun berturut-turut,

tahun 2017-2022 (3) Perusahaan BUMN yang menerbitkan laporan keuangan tahunan dalam mata uang rupiah dan (4) Perusahaan yang memiliki kelengkapan informasi mengenai variabel good corporate governance maupun data yang diperlukan untuk menghitung variabel efisiensi pengelolaan perusahaan. Sehingga diperoleh sampel sebanyak 11 perusahaan dengan periode selama 6 tahun dan jumlah data sebanyak 66 data observasi.

Definisi Operasional Variabel

Terdapat empat variable dalam studi ini yaitu dewan direksi, dewan komisaris independent, kepemilikan publik serta total asset turnover. Definisi operasional serta pengukuran dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Referensi
Dewan Direksi (X_1)	Dewan direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.	$Dewan\ Direksi = Jumlah\ Anggota\ Dewan\ Direksi$	(Annisa & Suhaili, 2022)
Dewan Komisaris Independen (X_2)	Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.	$Dewan\ Komisaris\ Independen = \frac{Jmlh\ Dewan\ Komisaris\ Independen}{Jmlh\ Anggota\ Dewan\ Komisaris}$	(Hidayat *et al.,* 2021; Prasetya & Santosa, 2020)
Kepemilikan Publik (X_3)	Kepemilikan Publik adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh masyarakat (pihak luar perusahaan).	$Kepemilikan\ Publik = \frac{Jumlah\ Saham\ yang\ dimiliki\ Publik}{Total\ Saham\ Beredar}$	(Masitoh & Hidayah, 2018)
Total Asset Turnover (Y)	*Total asset turnover* (TATO) adalah rasio aktivitas (rasio efisiensi) yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari total asetnya dengan membandingkan penjualan dengan total aset.	$TATO = \frac{Penjualan\ atau\ Pendapatan}{Total\ Aset}$	(Alarussi, 2021;. Alarussi & Alhaderi, 2018)

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan bantuan *software Eviews* 12. Adapun persamaan regresi data panel yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon$$

Keterangan :

Y	= *Total Asset Turnover* (TATO)
α	= Konstanta
β_1,β_2,β_3	= Koefisien Regresi Masing-masing variabel independen
X_1	= Dewan Direksi
X_2	= Dewan Komisaris Independen
X_3	= Kepemilikan Publik
i	= Perusahaan
t	= Periode
ε	= *Error term*

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	TATO (Y)	Dewan Direksi (X1)	Dewan Komisaris Independen (X2)	Kepemilikan Publik (X3)
Mean	0.275606	8.181818	0.440000	0.370152
Median	0.260000	7.000000	0.430000	0.400000
Maximum	0.650000	12.00000	0.700000	0.490000
Minimum	0.030000	6.000000	0.290000	0.020000
Std. Dev.	0.203138	2.299894	0.117434	0.126217
Skewness	0.267942	0.662731	0.439888	-1.261088
Kurtosis	1.552825	1.873457	2.198683	3.844480
Jarque-Bera	6.549087	8.321355	3.894319	19.45492
Probability	0.037834	0.015597	0.142679	0.000060
Sum	18.19000	540.0000	29.04000	24.43000
Sum Sq. Dev	2.682226	343.8182	0.896400	1.035498
Observations	66	66	66	66

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa jumlah data dari penelitian ini sebanyak 66 data observasi. Variabel efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara dengan proksi TATO (Y), menunjukkan nilai mean 0.2756 dan nilai standar deviasi 0.2031. Nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai mean menunjukkan bahwa

terdapat pola penyebaran data yang mengumpul (homogen), berarti tingkat sebaran data *total asset turnover* memiliki variasi yang kecil.

Variabel *Good Corporate Governance* dengan proksi dewan direksi (X_1) menunjukkan nilai mean 8.1818 dan nilai standar deviasi 2.2998. Nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai mean menunjukkan bahwa terdapat pola penyebaran data yang mengumpul (homogen), berarti tingkat sebaran data dewan direksi memiliki variasi yang kecil.

Variabel *Good Corporate Governance* dengan proksi dewan komisaris independen (X_2) menunjukkan nilai mean 0.4400 dan nilai standar deviasi 0.1174. Nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai mean menunjukkan bahwa terdapat pola penyebaran data yang mengumpul (homogen), berarti tingkat sebaran data dewan komisaris independen memiliki variasi yang kecil.

Variabel *Good Corporate Governance* dengan proksi kepemilikan publik (X_3) menunjukkan nilai mean 0.3701 dan nilai standar deviasi 0.1262. Nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai mean menunjukkan bahwa terdapat pola penyebaran data yang mengumpul (homogen), berarti tingkat sebaran data kepemilikan publik memiliki variasi yang kecil.

Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji *Chow*

Uji ini digunakan untuk menentukan *common effect model* atau *fixed effect model* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

Tabel 4. Uji *Chow (common effect model vs fixed effect model)*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	14.525877	(10,52)	0.0000
Cross-section Chi-square	87.995997	10	0.0000

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa nilai *probability cross-section chi-square* lebih kecil dibandingkan dengan nilai signifikansi yaitu 0.00<0,05. Jadi, model regresi yang terpilih adalah *fixed effect model.*

Uji *Hausman*

Uji ini digunakan untuk menentukan *fixed effect model* atau *random effect model* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

Tabel 5. Uji *Hausman (fixed effect model vs random effect model)*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.860298	3	0.6019

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa nilai *probability cross-section random* lebih besar dibandingkan dengan nilai signifikansi yaitu 0.60>0,05. Jadi, model regresi yang terpilih adalah *random effect model.*

Uji *Langrange Multiplier* (LM)

Uji ini digunakan untuk menentukan *common effect model* atau *random effect model* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

Tabel 6. Uji LM *(common effect model vs random effect model)*

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	71.11055	0.530706	71.64126
	(0.0000)	(0.4663)	(0.0000)
Honda	8.432707	0.728496	6.477949
	(0.0000)	(0.2332)	(0.0000)
King-Wu	8.432707	0.728496	5.463440
	(0.0000)	(0.2332)	(0.0000)
Standardized Honda	10.58516	0.985225	4.684051
	(0.0000)	(0.1623)	(0.0000)
Standarized King-Wu	10.58516	0.985225	3.504243
	(0.0000)	(0.1623)	(0.0002)
Gourieroux, et al.	--	--	7164126
			(0.0000)

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa nilai *probability breusch pangan* lebih kecil dibandingkan dengan nilai signifikansi yaitu 0.00<0,05. Jadi, model regresi yang terpilih adalah *random effect model.*

Tabel 7. Kesimpulan Pengujian Model Regresi Data Panel

No	Metode	Pengujian		Hasil
1	*Chow Test*	*Common effect model vs Fixed effect model*	*Prob. Cross-section Chi-square 0.00 < 0,05 (α)*	*Fixed effect model*
2	*Hausman Test*	*Fixed effect model vs Random effect model*	*Prob. Cross-random 0.60 < 0,05 (α)*	*Random effect model*
3	*Langrange Multiplier (LM-Test)*	*Common effect model vs Random effect model*	*Cross-section Breusch-pangan 0.00 < 0,05 (α)*	*Random effect model*

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka model yang terpilih untuk dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini adalah menggunakan ***random effect model*** **(REM).**

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan uji normalitas yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas dari hasil uji normalitas *(Jarque-Bera)* lebih besar dibandingkan dengan nilai signifikansi yaitu 0.119 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

	Dewan Direksi (X1)	Dewan Komisaris Independen (X2)	Kepemilikan Publik (X3)
Dewan Direksi (X1)	1.000000	0.840758	-0.241768
Dewan Komisaris Independen (X2)	0.840758	1.000000	-0.377189
Kepemilikan Publik (X3)	-0.241768	-0.377189	1.000000

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel 8, dapat diketahui bahwa nilai antar variabel lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu < 0,85. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas.

Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.048984	0.090990	0.538340	0.5923
Dewan Direksi (X1)	-0.010607	0.010203	-1.039577	0.3026
Dewan Komisaris Independen (X2)	0.301397	0.175406	1.718287	0.0907
Kepemilikan Publik (X3)	0.091813	0.136365	0.673286	0.5033

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel 9, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas variabel independen lebih besar dari >0,05. Diantaranya DD sebesar 0.3026 > 0,05, DKI sebesar 0.0907 > 0,05 dan KP sebesar 0.5033 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 10. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null Hypotesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.983407	Prob. F(2,59)	0.3801
Obs*R-squared	2.096927	Prob. Chi-Square(2)	0.3505

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel 10, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas chi square lebih besar dari nilai signifikansi, yaitu 0.3505 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan tabel 11, dapat diketahui bahwa variabel dewan direksi memiliki nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 0,2788 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh positif terhadap efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, artinya hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak.

Tabel 11. Hasil Regresi Data Panel-*Random Effect Model* (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.376668	0.173006	2.177194	0.0333
Dewan Direksi (X1)	-0.020103	0.018401	-1.092518	0.2788
Dewan Komisaris Independen (X2)	-0.467900	0.282147	-1.658359	0.1023
Kepemilikan Publik (X3)	0.727525	0.266682	2.728063	0.0083
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.149977	0.7599
Idiosyncratic random			0.084307	0.2401
Weighted Statistic				
R-squared	0.228837	Mean dependent var		0.061646
Adjusted R-squared	0.191523	S.D. dependent var		0.092897
S.E. of regression	0.083528	Sum squared resid		0.432573
F-statistic	6.132683	Durbin-Watson stat		0.690328
Prob(F-statistic)	0.001014			

Sumber: Data Diolah (2023)

Variabel dewan komisaris independen memiliki nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 0,1023 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, artinya hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak.

Variabel kepemilikan publik memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu 0,0083 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, artinya hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,191, artinya bahwa variabel independen yaitu *good corporate governance* yang diukur dengan dewan direksi (X_1), dewan komisaris independen (X_2) dan kepemilikan publik (X_3) dapat menjelaskan variabel dependen yaitu efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (Y) sebesar 19,1% sedangkan sisanya 80,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh dewan direksi terhadap efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel dewan direksi tidak berpengaruh terhadap efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara dengan tingkat signifikansi 5% (0,2788 > 0,05, H_1 ditolak). Artinya, dewan direksi tidak dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara. Pada titik tertentu semakin banyak dewan direksi maka bagus buat pengawasan, akan tetapi setelah titik tersebut semakin banyak anggota dewan direksi justru semakin buruk. Dewan direksi yang terlalu banyak akan membuat proses mencari kesepakatan dan membuat keputusan

menjadi sulit dan berlarut-larut sehingga dewan direksi tidak dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Ukuran dewan direksi yang terlalu banyak akan memperlambat proses pengambilan keputusan dan cenderung menimbulkan masalah dalam hal koordinasi dan komunikasi yang dapat menyebabkan terjadinya *agency problem*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fajri *et al.,* 2022) namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bancin & Harmain, 2022), (Subhan & Usman, 2022), (Eksandy, 2018) dan (Masitoh & Hidayah, 2018).

Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori agensi, bahwasanya semakin banyak dewan direksi yang bercampur tangan secara langsung diperusahaan maka akan meminimalisir penyebab terjadinya konflik agensi karena perusahaan bisa mengontrol kinerjanya sebaik mungkin sehingga efisiensi pengelolaan perusahaan bisa meningkat dan akan mudah menentukkan strategi perusahaan kedepannya, tetapi keadaan pada penelitian ini berbanding terbalik bahwa banyak dewan direksi yang tidak optimal untuk bekerja dalam mengontrol perusahaan maka akan menyebabkan mudah terjadinya suatu konflik agensi. Selain itu, perusahaan masih belum bisa untuk menjalankan tugasnya sebagai dewan direksi secara optimal dan belum mampu memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh pemegang saham.

Pengaruh dewan komisaris independen terhadap efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara dengan tingkat signifikansi 5% (0,1023 > 0,05, H_2 ditolak). Artinya, dewan komisaris independen tidak dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan sebaran data penelitian dapat dilihat bahwa nilai rata-rata secara keseluruhan menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/ bahwa jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Namun terdapat perusahaan sampel dalam penelitian ini memiliki persentase dewan komisaris independen dibawah nilai standar (30%) sehingga hal tersebut bisa mempengaruhi hasil dari penelitian.

Selain itu, diperkuat juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusumaningtyas, 2015) melalui pernyataannya bahwa jumlah dewan komisaris independen yang telah memenuhi standar ternyata tidak menjamin independensinya. Keberadaan dewan komisaris independen pada Badan Usaha Milik Negara kemungkinan diangkat hanya sebagai pemenuhan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan pemerintah saja, tetapi tidak melaksanakan fungsi monitoring dengan baik untuk menegakkan *good corporate governance* (Ariyani & Sukoco, 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Eksandy, 2018), (Masitoh & Hidayah, 2018) dan (Fajri *et al.,* 2022). Namun, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khanida & W, 2022).

Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori keagenan, yaitu dewan komisaris independen berperan dalam meminimalisir masalah keagenan yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu, dewan komisaris independen seharusnya dapat mengawasi kinerja para direktur agar terciptanya tata kelola perusahaan yang baik, dimana para dewan komisaris dapat mengontrol para manajer untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan. Sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Pengaruh kepemilikan publik terhadap efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara dengan tingkat signifikansi 5% (0,0083 < 0,05, H_3 diterima). Artinya, kepemilikan publik dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara. Kepemilikan publik yang memiliki proporsi besar dalam struktur kepemilikan saham di perusahaan, tentu akan lebih memberikan informasi perusahaan terhadap publik yang nantinya akan terbentuk *good corporate governance.* Hal tersebut dapat mengurangi tindakan *opportunistic* manajer yang dapat menimbulkan konflik keagenan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khanida & W, 2022). Namun, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Masitoh & Hidayah, 2018)

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keagenan, yaitu Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa publik mempunyai peran penting dalam menciptakan *well-functioning governance system* karena mereka memiliki *financial interest* dan bertindak independen dalam menilai manajemen. Dengan demikian, semakin besar kepemilikan publik dalam sebuah perusahaan maka semakin baik efisiensi pengelolaan dan kinerja keuangan perusahaan karena keterbukaan laporan keuangan perusahaan membuat manajemen menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk menjamin investor bahwa dana yang ditanamkan pada perusahaan digunakan secara efisien untuk menghasilkan keuntungan bersama.

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari semua variabel independen (dewan direksi, dewan komisaris independen dan kepemilikan publik) yang diduga berpengaruh positif terhadap efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, hanya variabel kepemilikan publik yang berpengaruh positif terhadap efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan dewan direksi dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan menilai kembali penerapan *good corporate governance* pada Badan usaha Milik Negara agar segala

kebijakan atau keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip *good corporate governance* sehingga memberikan pengaruh yang lebih kuat terhadap efisiensi pengelolaan perusahaan serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah objek penelitian hanya berfokus pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara tahun 2017-2022 dan hanya menggunakan salah satu indikator pengukuran *good corporate governance* yaitu dewan direksi, dewan komisaris independen dan kepemilikan publik dalam mengukur efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara serta pada periode penelitian yaitu pada tahun 2020 terjadi pandemi covid 19 sehingga kondisi perekonomian kurang bagus dan bisa mempengaruhi hasil penelitian. Maka saran bagi penelitian selanjutnya yaitu menggunakan indikator *good corporate governance* secara keseluruhan seperti dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional serta beberapa indikator lain yaitu salah satunya *leverage* dan sistem teknologi yang di adopsi oleh Badan Usaha Milik Negara yang turut memengaruhi sebagai salah satu faktor efisiensi pengelolaan perusahaan selain dari indikator-indikator yang telah diteliti. Serta penelitian selanjutnya dapat menambah rentang waktu penelitian dengan situasi yang normal.

Daftar Pustaka

Alarussi, A. S. A. (2021). Financial ratios and efficiency in Malaysian listed companies. *Asian Journal of Economics and Banking, 5*(2), 116–135. https://doi.org/10.1108/AJEB-06-2020-0014

Alarussi, A. S., & Alhaderi, S. M. (2018). Factors affecting profitability in Malaysia. J*ournal of Economic Studies, 45*(3), 442–458. https://doi.org/10.1108/JES-05-2017-0124

Amrullah, E., & Eriandani, R. (2013). Pengaruh good corporate governance terhadap efisiensi perusahaan berdasarkan DEA pada BUMN dan non BUMN yang terdaftar di BEI periode 2009-2011. *Proceding The Corporate Sustainability National Conference (pp. 1–19)*. Jakarta : LPFE Universitas Trisakti. http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/32705

Annisa, M. Z., & Suhaili, A. (2022). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan terbuka sektor konsumsi Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi, 23*(1), 94–107. http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/index.php/jma/article/view/863

Ariyani, V., & Sukoco, Y. D. (2022). Pengaruh penerapan good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang tercatat di BEI 2015-2019. *JRMA (Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi), 10*(03), 215–228.

Bancin, K. A., & Harmain, H. (2022). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan terdaftar di bei tahun 2016-2020. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, 6*(4), 3714–3723. https://doi.org/10.33508/jrma.v10i3.1135

Eksandy, A. (2018). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah indonesia. *Jurnal Akuntansi, 5*(1), 1–10. https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.498

Fajri, F., Akram, & Mariadi, Y. (2022). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN sektor keuangan. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 2*(2), 307–320. http://dx.doi.org/10.29303/risma.v2i2.229

Franita, R. (2018). Mekanisme good corporate governance dan nilai perusahaan: studi untuk perusahaan telekomunikasi. Medan : Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.

Ghofur, A., & Sukmaningrum, P. S. (2018). Pengaruh good corporate governance terhadap efisiensi Bank Syariah tahun 2012-2016 dengan kinerja sosial sebagai variabel intervening. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 4*(1), 30–47. https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.10047

Hanafi, M. M., & Halim, A. (2009). Analisis laporan keuangan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Hidayat, T., Triwibowo, E., & Marpaung, N. V. (2021). Pengaruh good corporate governance dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa, 6*(1), 1–18. https://doi.org/10.37366/akubis.v6i01.230

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics, 3*(4), 305–360. *https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X*

Khanida, M., & W, T. D. (2022). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di BEI periode 2019-2021. Bisman (Bisnis Manajemen): *The Journal of Business and Management, 5*(2), 280–299. https://doi.org/10.37112/bisman.v5i2.2048

Kurniawan, R. (2021). Menyelamatkan atau mengubur Garuda Indonesia. Kemenkeu.go.id. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru/baca-artikel/14352/Menyelamatkan-atau-Mengubur-Garuda-Indonesia.html

Kusumaningtyas, T. K. (2015). Pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan yang terdaftar pada indeks sri-kehati. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 4*(7). http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3539

Laurent, S. S. (2019). Pengaruh corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan di BEI. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi, 1*(2), 135–144. https://doi.org/10.24912/jpa.v1i2.4674

Masitoh, N. S., & Hidayah, N. (2018). Pengaruh penerapan good corporate governance terhadap kinerja perusahaan (Studi empirik pada perusahaan perbankan di BEI tahun 2014 – 2016). *Jurnal Tekun, 1*(1), 49–57. https://dx.doi.org/10.22441/tekun.v8i1.2596

Panjaitan, E. P. A., Haryanto, & Said, D. (2022). Pengaruh penerapan good corporate governance dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer, 15*(2), 102–113. https://doi.org/10.26487/akrual.v15i2.21623

Prasetya, G. P. L., & Santosa, A. (2020). Good corporate governance, struktur kepemilikan dan kinerja perusahaan properti dan real estate. *Capital: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 3(*2), 114–138. http://doi.org/10.25273/capital.v3i2.6079

Saputra, I. P. A., & Mahyuni, L. P. (2018). Pengaruh struktur kepemilikan dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 15*(3), 64–81. https://doi.org/10.38043/jmb.v15i3.607

Sarafina, S., & Muhammad, S. (2017). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan (Studi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 50(3).*
http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2012

Subhan, S. M., & Usman, B. (2022). Pengaruh rasio keuangan, good corporate governance, resiko bisnis terhadap efisiensi perusahaan di perusahaan manufaktur yang terdaftar bei. Syntax Literate: *Jurnal Ilmiah Indonesia, 7*(9), 13979–13998. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.10065